

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Akuntansi dan Budaya Lokal

Hauriasi dan Davey (2009, 250) merangkum studi-studi tentang akuntansi dan budaya pada beberapa dekade terakhir, bahwa telah nampak peningkatan penelitian yang dilakukan untuk menilai kesesuaian sistem akuntansi Barat yang diimpor ke negara berkembang (lihat juga misalnya Askary, 2006; Briston, 1978; Brown dan Tower, 2002; Chand, 2005; Hove, 1986; Perera, 1989b; Samuels dan Oliga, 1982; Wallace, 1990; Wickramasinghe dan Hopper, 2005). Studi-studi yang telah dilakukan meragukan kemampuan sistem tersebut (praktik akuntansi Barat) untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, sehingga konsekuensinya bagi negara-negara berkembang terpanggil untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, dan berdasarkan keadaan lokal, untuk mengembangkan sistem baru atau memodifikasi yang ada. Mengingat sejarah dominasi imperialisme Barat dan kolonialisme, sulit tanpa mengapresiasi dampak akuntansi dan sistem akuntansi terhadap nilai-nilai budaya dan adat masyarakat.

Peran yang telah dimainkan dalam kolonialisasi akuntansi dan dampaknya terhadap masyarakat adat/budaya (*indigenous culture*) semakin banyak diperdebatkan (Gibson, 2000; Neu, 2000). Sebagian besar penelitian terbaru menyoroti ketegangan yang melekat antara nilai-nilai akuntansi Barat dan inti nilai-nilai adat lokal. Sering kali, nilai-nilai adat lokal misalnya mengenai pekerjaan, tanah, dan kekerabatan yang fundamental bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dikenakan oleh akuntansi dan sistem akuntansi (Greer dan Patel, 2000). Sistem akuntansi Barat yang dominan dan praktiknya cenderung meningkatkan nilai properti dan ekonomi keluarga dan sosial di atas nilai-nilai adat.

Bukti bahwa integrasi ekonomi global dan nilai-nilai ekonomi yang sempit telah mengancam *core value* suatu budaya ditunjukkan dalam penelitian Hauriasi dan Davey (2009). Penelitian Hauriasi dan Davey dilakukan terhadap 25 partisipan yang terdiri dari manajer keuangan senior di sektor pemerintah dan sektor swasta, akuntan akademisi, akuntan profesional, pemuka agama, dan komunitas pemimpin adat pada Kepulauan Solomon yaitu sebuah negeri yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keterikatan dan tanggungjawab kekerabatan yang terwujud dalam perspektif adat pada pekerjaan dan tempat tinggal. *Interview* terhadap partisipan pertama dilakukan pada tahun 1997 dan terakhir 2007.

Partisipan diminta pandangannya tentang hubungan nilai-nilai adat terhadap tiga tema penting yaitu perilaku, aktivitas ekonomi dan akuntansi. Di samping itu juga pandangan tentang hubungan adopsi sistem Barat terhadap tiga tema penting tersebut. Hasil penelitian Hauriasi dan Davey (2009) menunjukkan pandangan yang saling berlawanan antara nilai-nilai adat dan adopsi sistem Barat. Nilai-nilai budaya Solomon menjunjung tinggi akuntabilitas yang transparan, kepemimpinan yang konsultatif, dan hubungan kekerabatan serta mencatat tanggungjawab sosialnya. Sebaliknya mereka menghindari beberapa hal, yaitu: orientasi keuntungan/kekayaan, kompetisi antar anggota kelompok, pemisahan entitas atas pemilik, dan pembatasan waktu. Selengkapnya hasil penelitian mereka sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Perbedaan Karakteristik Masyarakat Solomon
dalam Konteks Adopsi Ekonomi Barat dan Budaya Lokal

Theme	Sub-theme	Traditional society	Contemporary society
Behavioral themes	Forms of accountability	Close knit community ensures greater transparency, personal accountability from	Leaders often remote from subjects, less transparent, often discharge

		leaders	accountability through institutions
	Command and control	Leaders operate through consultation and consensus	Individuals and institutions given formal powers to command and control subjects
	Human relationships	Kinship relations are paramount and cement societies	Kinship relations still important but under strain from demands of capitalistic activities
Business/economic themes	Profit maximization and wealth accumulation	Profit making and wealth Accumulation unimportant, if not discouraged	Profit making for business is preferred but not at the expense of family relationships
	Separation of business entity from ownership	No separation exists in traditional worldview	Accounting is promoted along this principle but limited application
	Competition	Takes place between members of out-groups, discouraged between and among family groups	Implicit competition among related groups and individuals. Open competition only between unrelated groups
Accounting themes	Forms of accounting	Mostly oral transmission. Use of physical objects to record social obligations	Use western accounting systems mainly to meet statutory obligations
	Time consciousness	Work done at personal convenience. Time is unimportant	Value of time is being recognized, but minimal adaptation to its demands
	Personal performance measurement	Being part of group more important than personal contribution	Recognized in modern organizations but limited application

--	--	--	--

Sumber: Hauriasi dan Davey (2009, 251)

Jauh sebelum hasil penelitian Hauriasi dan Davey (2009) tersebut dipublikasi, Chew dan Greer (1997) sudah menemukan realitas bentuk penindasan dan alienasi terhadap masyarakat Aborigin Australia dan Torres oleh imperialisme Barat. Dalam papernya Chew dan Greer menguji peran akuntansi dalam penindasan dan alienasi secara terus-menerus terhadap orang-orang Aborigin Australia dan Torres. Tulisan Chew dan Greer juga dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dengan menguji masalah yang timbul dari paksaan Barat terhadap bentuk akuntabilitas dalam konteks Australia Aborigin dan masyarakat Torres Strait Islander (ATSI). Hal ini ter-motivasi oleh pernyataan Yirra yang disajikan kepada Menteri dalam negeri Aborigin oleh *Kimberley Land Council*. Dalam pernyataan Yirra, *Kimberley Land Council* mendorong pembentukan otoritas Regional Kimberley sama dengan *Torres Strait Islander Authority* yang akan mengambil alih beberapa fungsi saat ini dilakukan Aborigin dan *Torres Strait Islander Commission* (ATSIC) karena ATSIC dalam bentuk sekarang tidak lagi relevan dengan kebutuhan orang Kimberley.

Munculnya ketegangan antara pihak yang mengadopsi sistem akuntabilitas Barat dengan masyarakat adat Aborigin disebabkan oleh beberapa masalah (Chew dan Greer, 1997), yaitu: pertama masalah struktur, organisasi modern cenderung mengandalkan *ex-post control* seperti halnya akuntansi, karena pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada manajer tingkat bawah, sementara komunitas Aborigin bergantung pada *ex-ante control* dimana pengambil keputusan ada di tingkat akar rumput. Yang kedua adalah masalah ideologi di mana wacana dominasi memiliki potensi untuk membuat atau mengubah kesadaran diri mereka yang terlibat dalam proses akuntabilitas. Sistem akuntabilitas dalam konteks Aborigin harus mempertimbangkan budaya Aborigin dan menghindari potensi kolonisasi sistem akuntansi.

Melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Chew dan Greer (1997), penelitian Gibson (2000) mempertegas bahwa bahasa dan terminologi akuntansi telah dan terus-menerus menjadi sebuah senjata yang efektif untuk membuat ketidakberdayaan (*disempowerment*) dan pencabutan hak (*dispossession*) masyarakat Aborigin Australia. Dua senjata yang digunakan untuk membuat masyarakat Aborigin tidak berdaya adalah *economic tool* berupa akuntansi dan retorika akuntabilitas (Gibson, 2000). Salah satu bentuk yang membuat *disempowerment* masyarakat Aborigin adalah konsep tentang kepemilikan tanah, yaitu sebagai berikut:

. . . was used, cared for and held in trust for future generations. It was also shared with others: to control land is not to enjoy it exclusively but rather to exercise the right, which is at the same time an obligation, to allocate rights in its resource to others.

Kontras dengan gagasan akuntansi modern tentang aset ini terutama jelas dalam masalah kendali atas aset tersebut. Persyaratan definisi untuk pengendalian dalam hubungannya dengan aset secara khusus dinyatakan sebagai hak untuk mengecualikan orang lain dari manfaat (SAC 4, 1995). Keinginan masyarakat tradisional (dan kewajiban) untuk berbagi memainkan peran besar dalam mencegah *dis-empowerment* Aborigin, seperti, dalam hubungan mereka dengan pemukim Eropa, mereka tidak menyadari sebuah paradigma ekonomi yang mengakui milik pribadi menggantikan hak-hak kepentingan masyarakat bahkan kepentingan generasi masa depan karena bagi mereka tanah tidak dapat dialihkan menjadi milik pribadi

B. Studi Akuntansi dan Budaya Jawa

Zulfikar (2008) menyimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan budaya Jawa dalam falsafah hidup dan etos kerja paling tidak tercermin pada peribahasa *sapa sing gelem obah bakal mamah*. Peribahasa tersebut mengandung arti bahwa siapa yang mau

bergerak (bekerja) pasti bisa makan (Prabowo, 2003: 23). Maknanya bahwa kita harus bekerja untuk bisa menghasilkan apa yang bisa dimakan. Perilaku *obah* (bekerja) bagi sebagian besar orang Jawa adalah merupakan suatu yang harus dipraktikkan di manapun tempatnya mereka berada dan dengan seluruh kemampuan (*capital*) yang dimilikinya (Zulfikar, 2008). Konsekwensi positif dari perilaku *obah* adalah akan memunculkan *mamah* (makan). *Mamah* sebenarnya merupakan bagian dari rizqi yang Tuhan berikan. *Obah* merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap individu. Bagi orang Jawa setiap aktivitas *obah* akan mengeluarkan sejumlah uang atau dengan sebutan *udhu* (ada arus kas yang keluar) sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan (ada arus kas yang masuk)(Zulfikar, 2008).

Sementara dalam praktik bisnis orang Jawa dikenal peribahasa *tuna satak bathi sanak*. Peribahasa tersebut bermakna biarpun rugi uang (*satak*) tidak mengapa, asalkan untung saudara (*sanak*). Ungkapan yang sering dijumpai dalam pergaulan bisnis para *bakul* (pedagang) tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan orang berdagang tidak selalu diukur dengan keuntungan berupa uang, melainkan keuntungan bisa dalam bentuk lain, misalnya keuntungan karena menambah persaudaraan (Zulfikar, 2008). Ukuran kekayaan seseorang tidak selalu ditentukan oleh banyaknya harta yang dimiliki. Orang Jawa merupakan sosok yang dapat menerima kondisi atau nasib yang menimpa dirinya dengan dilandasi rasa percaya pada kemurahan Tuhan YME, sehingga segala sesuatu diterima dengan jiwa *narima ing pandhum* (Marbangun, 1995:65).

Penelitian Daryono (2007) tentang etos bisnis Jawa dalam pemikiran Sri Mangkunegaran IV menyebutkan bahwa acuan teoritis etos bisnis tersebut Jawa mengacu pada *the stakeholders benefit*, artinya manfaat bagi *stakeholders* yang teori manajemennya disebut sebagai *stakeholder-approach*. Dalam teori manajemen tersebut kegiatan bisnis memiliki nilai instrinsik sendiri (misalnya, memproduksi sesuatu yang berguna bagi masyarakat), maka aktivitas itu tidak baru menjadi bernilai karena membawa untung (Daryono 2007, 182). Maksudnya, keuntungan

(laba) hanya sekedar sebagai salah satu acuan dasar bagi motivasi melaksanakan bisnisnya.

C. Roadmap Penelitian

